



---

## Implementasi Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI Berdasarkan SAK ETAP Pada BUMDes Sambangan

Ida Ayu Wulan Setyari<sup>1</sup>, I Gede Agus Pertama Yudiantara<sup>2</sup>, Sunitha Devi<sup>3</sup>

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha<sup>1-3</sup>

Email korespondensi: [ayu.wulan.setyari@student.undiksha.ac.id](mailto:ayu.wulan.setyari@student.undiksha.ac.id), [agus.yudiantara@undiksha.ac.id](mailto:agus.yudiantara@undiksha.ac.id), [sunitha.devi@undiksha.ac.id](mailto:sunitha.devi@undiksha.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 26 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyse the implementation of accrual-based accounts receivable accounting at the Giri Amertha Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Sambangan Village in accordance with SAK ETAP, as well as the challenges encountered in its application. This study employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that BUMDes Sambangan has conducted credit transactions that have generated receivables; however, the application of accrual-based accounts receivable accounting has not yet fully complied with SAK ETAP. According to SAK ETAP, receivables should be recognised when the right to collect arises, measured at their realisable value, and presented as current assets in the statement of financial position. However, the practices employed by BUMDes still use a cash basis, meaning receivables are only recorded when cash is received. Furthermore, the measurement of receivables is not supported by the recording of provisions for uncollectible receivables, and their presentation is not shown separately in the financial statements. The main challenges faced include limited human resource capabilities, a lack of understanding of SAK ETAP, and a financial recording system that remains rudimentary. Nevertheless, BUMDes Sambangan has been carrying out financial reporting on a regular basis as a form of accountability to the village government and the community.*

**Keywords:** Accounts Receivable Accounting, Accrual Basis, BUMDes, SAK ETAP, Accountability

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Giri Amertha Desa Sambangan berdasarkan SAK ETAP serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sambangan telah melakukan transaksi kredit yang menimbulkan piutang, namun penerapan akuntansi piutang berbasis akrual belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Berdasarkan SAK ETAP, piutang seharusnya diakui pada saat timbul hak tagih, diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan, dan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Namun, praktik yang dilakukan BUMDes masih menggunakan basis kas, sehingga piutang baru dicatat ketika kas diterima. Selain itu, pengukuran piutang belum didukung oleh pencatatan penyisihan piutang tak tertagih dan penyajiannya belum ditampilkan secara tersendiri dalam laporan keuangan.*

---

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai SAK ETAP, serta sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana. Meskipun demikian, BUMDes Sambangan telah melaksanakan pelaporan keuangan secara rutin sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah desa dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Akuntansi Piutang, Basis Akrua, BUMDes, SAK ETAP, Akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi desa. Kebijakan ini mendorong desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional demi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes hadir sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan sosial yang dimiliki desa. Sinarwati (2023) menyatakan bahwa "*BUMDes have a strategic role to build village entrepreneurs*", menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong tumbuhnya kewirausahaan desa demi mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing. Menurut Musmini dkk. (2024), pengelolaan pencatatan keuangan BUMDes adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi karena mampu membantu mencatat transaksi keuangan secara akurat dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola keuangan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pencatatan keuangan BUMDes masih sering dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual. Regulasi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan pentingnya penerapan basis akrual untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan mengakui transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul, sehingga mampu menyajikan gambaran posisi keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan basis kas. Menurut Gunawan dan Sujana (2023), penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan informasi yang lebih lengkap bagi pengambilan keputusan. Sinarwati dan Suarmanayasa (2023) menegaskan bahwa "*The establishment of BUMDes is the implementation of productive economic management of the village's potency being carried out in transparent, accountable, cooperative, emancipation, participatory, and sustainable*

way", sehingga sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang andal menjadi elemen penting untuk mendukung keberlangsungan serta kredibilitas BUMDes.

Dalam konteks akuntansi berbasis akrual, salah satu akun yang paling krusial adalah akun piutang. Piutang merupakan aset yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, memberikan hak bagi entitas untuk menerima kas di masa mendatang. Apabila pencatatan piutang tidak dilakukan secara tepat, informasi mengenai nilai aset BUMDes dapat menjadi tidak akurat, dan timbul risiko keterlambatan penagihan, ketidakjelasan jumlah piutang, serta potensi piutang tak tertagih. Hal ini sejalan dengan Indrawan dan Dewi (2022) yang menyatakan bahwa banyak pengelola BUMDes belum memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sering tidak tepat waktu dan belum sepenuhnya sesuai standar. Efektivitas sistem informasi akuntansi BUMDes juga harus menunjukkan efektivitas dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan akurasi datanya (Indrawan & Dewi, 2022).

Fenomena tersebut ditemukan pada BUMDes Giri Amertha Desa Sambangan, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan observasi awal, pencatatan transaksi keuangan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang. Puspita dan Adiputra (2023) menegaskan bahwa "*The problems experienced by BUMDes are diverse, starting from cases of fraud in the use of BUMDes funds by irresponsible individuals, lack of understanding of the perpetrators regarding how to manage BUMDes, both capital management, recording financial reports, product marketing, utilization of natural resources in the village and lack of awareness from related parties regarding BUMDes management*", sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan sesuai standar akuntansi. Bapak Made Arsana selaku Bendahara BUMDes Sambangan (28 Juli 2025) menyatakan:

*"Pemahaman terhadap akuntansi berbasis akrual masih terbatas sehingga pencatatan yang dilakukan cenderung bersifat praktis dan belum sepenuhnya mengikuti prosedur akuntansi yang sistematis."*

Ibu Luh Putu Indra Noviarini selaku Direktur BUMDes Sambangan (10 Maret 2026) menjelaskan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan bukti transaksi dan dilaporkan secara rutin kepada pemerintah desa:

*"BUMDes Sambangan menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan kepada pemerintah desa melalui rapat evaluasi. Selain itu, hasil usaha dan laporan tahunan juga dipresentasikan dalam musyawarah desa agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan BUMDes. Tahap triwulan yang pertama pada internal pengawasan dan penasehat, yang kedua pra musdes dipimpin oleh pemerintah desa dan BPD, dan yang ketiga itu musyawarah desa disaksikan oleh pemerintah desa, BPD, masyarakat, unit-unit terkait."*

Meskipun upaya transparansi telah berjalan, namun belum sepenuhnya didukung oleh kualitas penyajian informasi keuangan yang lengkap sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual terlihat dari belum disajikannya akun piutang dalam

---

laporan keuangan. Kondisi ini sejalan dengan Astawa dan Dewi (2021) yang menemukan bahwa sistem pencatatan masih sederhana karena belum ada pemisahan yang jelas antara kas masuk dan kas keluar. Dalam perspektif *good governance*, Bonollo (2022) menegaskan bahwa "*Coercive pressures arise from formal and informal pressures exerted on organisations by other organisations upon which they are dependent, and by cultural expectations in the society within which organisations function*". Sementara itu, Dharmawan dan Yudiantara (2020) menyatakan bahwa "*Accountability is used as a synonym for many loosely defined political desiderata, such as good governance, transparency, equity, democracy, efficiency, responsiveness, responsibility and integrity*", menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup kelengkapan dan keandalan informasi, bukan sekadar penyampaian laporan secara rutin.

BUMDes termasuk entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga standar yang sesuai adalah SAK ETAP versi 2009 revisi 2016 yang memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang secara sistematis. Dalam kerangka teori institusional yang dikembangkan Meyer dan Rowan (1977) serta DiMaggio dan Powell (1983), penerapan SAK ETAP oleh BUMDes merupakan bentuk konformitas terhadap norma dan regulasi yang diharapkan pemangku kepentingan, bukan semata-mata kebutuhan teknis akuntansi. CIPFA (2020) menekankan bahwa "*Good governance in the public sector encourages better decision-making*", sehingga akuntansi akrual menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab. Bapak Made Arsana selaku Bendahara BUMDes Sambangan (28 Juli 2025) juga menyampaikan:

*"Karena latar belakang pendidikan saya bukan dari keilmuan ekonomi ataupun akuntansi, jadi saya hanya mengetahui akuntansi ataupun ekonomi secara umum saja, kalau untuk mengetahui akuntansi berbasis akrual itu mencatat transaksi saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan."*

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat urgensi penelitian ini. Budiya dan Dewi (2023) membuktikan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes, mengindikasikan bahwa kualitas akuntansi merupakan faktor kunci keberhasilan operasional. Veronika dan Atmadja (2024) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan BUMDes dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta kompetensi sumber daya manusia pengelola. Firdaus dan Dewi (2025) menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi yang digunakan, semakin tinggi pula kinerja pengelola, sehingga pengendalian internal yang efektif mendorong pencapaian target kinerja. Adnyani & Diatmika I (2025) menemukan bahwa meskipun akuntansi berbasis akrual telah diterapkan sesuai PP No. 71 Tahun 2010, implementasinya masih terkendala keterbatasan SDM yang tidak seluruhnya berlatar belakang akuntansi kondisi yang paralel dengan BUMDes Sambangan. Wasuka dan Sinarwati (2025) menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan aplikasi akuntansi berbasis regulasi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes agar lebih lengkap, transparan, dan akuntabel. Purnamawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan digitalisasi sistem akuntansi BUMDes

membantu SDM menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP yang mencakup neraca, laporan hasil usaha, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Musmini dkk. (2024) membuktikan bahwa pelatihan dan pendampingan di BUMDes Giri Amertha Desa Sambangan berhasil meningkatkan pemahaman pengelola, termasuk dalam pencatatan dan analisis umur piutang unit PAM Desa. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada pelatihan dan faktor-faktor kualitas laporan keuangan secara umum, sedangkan evaluasi komprehensif atas implementasi akuntansi piutang berbasis akrual berdasarkan SAK ETAP mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, kendala, dan implikasinya terhadap akuntabilitas belum dilakukan secara mendalam pada BUMDes Sambangan.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akuntansi piutang berbasis akrual melalui penelaahan praktik pencatatan dan penyajian akun piutang serta perbandingannya dengan ketentuan SAK ETAP. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Sambangan serta menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku, dengan judul "Implementasi Akuntansi Piutang Berbasis Akrual Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Sambangan".

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di BUMDes Giri Amertha, Jalan I Dewa Made Kaler, Banjar Dinas Kajanan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, sejak Juni 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi aktivitas keuangan BUMDes yang telah mengarah pada sistem akrual namun belum sepenuhnya optimal. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang berdasarkan SAK ETAP, khususnya pada unit usaha wisata dan air bersih. Informan dipilih secara *purposive* terdiri atas tiga pihak, yaitu Direktur BUMDes (Luh Putu Indra Noviarini), Bendahara BUMDes (Made Arsana), dan dosen akuntansi (Dr. Ni Kadek Sinarwati, S.E., M.Si., Ak.) sebagai informan tambahan yang memberikan perspektif akademis terkait kesesuaian praktik dengan SAK ETAP. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, observasi langsung terhadap sistem pencatatan keuangan di lapangan, serta dokumentasi berupa laporan keuangan, bukti transaksi, dan struktur organisasi BUMDes. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyortir dan memilih informasi yang relevan dengan pengakuan, pengukuran, dan penyajian akun piutang berbasis akrual. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, tabel, dan matriks untuk menunjukkan pola hubungan antara penerapan akuntansi akrual dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Pada tahap akhir, kesimpulan diuji keabsahannya melalui verifikasi dan triangulasi. Mengacu pada Andriani dan Atmadja (2022) yang merujuk pada Patton,

keabsahan data diuji melalui uji *credibility* yang mencakup triangulasi sumber (membandingkan data dari direktur, bendahara, dan pengelola BUMDes), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta *member check* untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan maksud informan, sehingga temuan penelitian valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

BUMDes Giri Amertha merupakan badan usaha milik desa yang berlokasi di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa Sambangan memiliki potensi ekonomi yang berkembang, khususnya di sektor pariwisata alam dan pengelolaan sumber daya air. Batas wilayah desa: utara berbatasan dengan kawasan perbukitan, selatan dengan Kelurahan Banyuasri (Kota Singaraja), barat dengan Desa Ambengan, dan timur dengan Desa Panji. BUMDes Giri Amertha hadir sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola potensi tersebut melalui unit usaha air bersih dan pariwisata, sehingga mendukung peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari direktur, bendahara, dan pengelola unit usaha. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian diverifikasi dengan teknik triangulasi.

### *Implementasi Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI pada BUMDes Sambangan*

BUMDes Giri Amertha telah menjalankan aktivitas usaha yang menimbulkan transaksi kredit, khususnya pada unit usaha air bersih. Namun, pencatatan keuangan masih menggunakan basis kas transaksi diakui saat kas diterima, bukan saat transaksi terjadi. Piutang belum dicatat secara sistematis dalam laporan keuangan, belum dilengkapi informasi jatuh tempo, dan mekanisme penagihan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman akuntansi berbasis akrual serta belum adanya sistem pencatatan yang terstruktur.

#### a) Pengakuan Piutang

Menurut SAK ETAP, piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih akibat transaksi kredit, meskipun kas belum diterima. Pada BUMDes Sambangan, pelanggan menggunakan layanan air terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan setelah pemakaian dicatat, sehingga secara ekonomi menimbulkan piutang bagi BUMDes.

*"BUMDes memiliki transaksi penjualan secara kredit, khususnya pada unit usaha air. Dalam praktiknya, pelanggan menggunakan layanan air terlebih dahulu, kemudian pembayaran dilakukan setelah pemakaian dicatat, sehingga menimbulkan piutang bagi BUMDes."*

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan Selain itu, terdapat kondisi keterlambatan pembayaran dari pelanggan yang menyebabkan piutang belum tertagih dalam periode tertentu. Namun dalam praktiknya, piutang belum diakui secara formal dalam laporan keuangan

---

pendapatan masih diakui saat kas diterima. Akibatnya, akun piutang tidak tersaji dalam neraca meskipun transaksi kredit telah terjadi, sehingga laporan keuangan belum mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya.

b) Pengukuran Piutang

SAK ETAP menetapkan bahwa piutang diukur sebesar nilai yang dapat ditagih atau nilai nominal yang diharapkan diterima. Apabila terdapat risiko tidak tertagih, entitas perlu membentuk cadangan kerugian piutang. BUMDes Sambangan telah melakukan penentuan jumlah tagihan berdasarkan data pemakaian air yang direkap oleh kolektor lapangan.

*"Pencatatan tagihan pelanggan dilakukan dengan cara merekap data pemakaian air yang sebelumnya telah dicatat oleh kolektor di lapangan. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan direkap sebagai dasar untuk menentukan jumlah tagihan masing-masing pelanggan."*

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan BUMDes juga telah memiliki buku pembantu piutang untuk mencatat rincian tagihan pelanggan. Namun pengukuran masih terbatas pada nilai nominal tagihan tanpa penilaian cadangan kerugian piutang maupun pengelompokan umur piutang. Saldo piutang pun tidak tercermin dalam neraca tahun 2025.

*"Pencatatan piutang saat ini masih dilakukan di luar pembukuan utama. Oleh karena itu, saldo piutang tidak tercermin dalam laporan keuangan, khususnya pada neraca tahun 2025."*

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan

c) Penyajian **Piutang**

Menurut SAK ETAP, piutang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar apabila dapat ditagih dalam satu tahun, beserta penyisihan piutang tak tertagih sebagai pengurang. Pada BUMDes Sambangan, meskipun terdapat transaksi kredit, piutang belum disajikan dalam neraca. Selain itu, BUMDes belum memiliki daftar umur piutang.

*"BUMDes belum memiliki daftar umur piutang."*

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan Proses rekapitulasi yang masih manual berisiko menimbulkan keterlambatan dan kesalahan. Ketiadaan daftar umur piutang menyebabkan BUMDes sulit memantau kelancaran penagihan dan mengidentifikasi piutang berpotensi tidak tertagih. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan belum mencerminkan jumlah aset lancar yang sebenarnya.

d) Kesesuaian dengan SAK ETAP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akuntansi piutang pada BUMDes Sambangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan SAK ETAP versi 2009 revisi 2016. Piutang tidak diakui dalam laporan keuangan meskipun transaksi kredit telah

terjadi, dan pencatatan masih bersifat administratif di luar sistem akuntansi utama. tabel 1 merangkum kesenjangan tersebut.

**Tabel 1. Ketentuan SAK ETAP dan Kondisi BUMDes Sambangan**

Aspek	Ketentuan SAK ETAP	Kondisi di BUMDes Sambangan	Keterangan
Pengakuan	Diakui saat hak tagih	Tidak diakui	Tidak sesuai
Basis	Akrual	Kas	Tidak sesuai
Pencatatan	Dalam sistem utama	Buku pembantu	Belum terintegrasi
Penyajian	Dalam neraca	Tidak disajikan	Tidak sesuai
Pengukuran	Nilai andal	Rekap air	Sebagian sesuai
Pengendalian	Ada umur piutang	Tidak ada	Tidak sesuai
Piutang Tak Tertagih	Ada cadangan	Tidak dicatat	Tidak sesuai

Sumber: Data hasil penelitian, 2026

### *Analisis Berdasarkan Teori*

#### a) Teori Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga laporan keuangan mencerminkan seluruh hak dan kewajiban entitas. Pada BUMDes Sambangan, transaksi kredit dan buku pembantu piutang telah ada, namun piutang belum diintegrasikan ke laporan keuangan utama dan pengakuan pendapatan masih berbasis kas. Keterbatasan sistem pencatatan serta SDM menjadi faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya basis akrual secara menyeluruh.

#### b) Teori Institusional

Teori institusional menjelaskan bahwa implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh regulasi eksternal sekaligus kesiapan internal organisasi. Meskipun SAK ETAP sebagai pedoman eksternal telah tersedia, implementasinya belum optimal karena keterbatasan SDM dan sistem pencatatan yang masih sederhana. Pengelola keuangan menghadapi kendala keterlambatan rekap data dari kolektor, yang menunjukkan sistem kerja belum berjalan efektif.

#### c) *Good Governance*

Dari perspektif *good governance*, BUMDes Sambangan belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan piutang. Piutang tidak tersaji dalam laporan keuangan menyebabkan informasi keuangan kurang lengkap dan kurang mencerminkan seluruh aset BUMDes. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan mempersulit evaluasi kinerja. Tabel 2 merangkum kondisi tersebut.

**Tabel 2. Penerapan Prinsip *Good Governance* dan Kondisi BUMDes Sambangan**

Aspek	Prinsip <i>Good Governance</i>	Kondisi di BUMDes Sambangan	Keterangan
Transparansi	Informasi keuangan disajikan lengkap	Piutang tidak disajikan	Belum transparan
Akuntabilitas	Dapat dipertanggungjawabkan	Pencatatan masuk pembukuan utama	Belum optimal
Kelengkapan Informasi	Semua aset dicatat	Piutang di luar pembukuan	Tidak lengkap
Pengendalian Internal	Ada sistem pengendalian	Tidak ada umur piutang/kebijakan	Lemah
Keandalan Informasi	Informasi akurat	Data tidak terintegrasi	Kurang andal

Sumber: Data hasil penelitian, 2026

### ***Kendala Implementasi***

Kendala utama dalam pencatatan piutang adalah keterlambatan proses rekapitulasi data dari kolektor lapangan. Data pemakaian air yang menjadi dasar penentuan tagihan sering terlambat dilaporkan kepada bendahara, sehingga pencatatan tidak tepat waktu dan penagihan kepada pelanggan tertunda.

*"Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam merekap data yang berasal dari kolektor. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sehingga proses pencatatan menjadi tidak tepat waktu."*

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan  
Selain kendala teknis, keterbatasan SDM menyebabkan pembagian tugas belum optimal bendahara harus menangani berbagai pekerjaan administratif sekaligus. Minimnya tenaga kerja berkompetensi akuntansi dan belum adanya sistem pencatatan terintegrasi memperbesar risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian informasi. Dalam perspektif good governance, kondisi ini memerlukan peningkatan kapasitas SDM serta pengembangan sistem pencatatan yang lebih efektif.

### ***Dampak terhadap Akuntabilitas***

Belum optimalnya pencatatan piutang berdampak pada kualitas informasi keuangan BUMDes, terutama dalam menilai posisi keuangan dan potensi penerimaan di masa mendatang. Tidak adanya analisis umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih memperlemah pengendalian piutang. Keterlambatan laporan dari kolektor memperburuk kondisi ini.

*"Kadang laporan dari kolektor terlambat direkap dan diserahkan, jadi pencatatan pembayaran pelanggan juga ikut terlambat dimasukkan ke laporan keuangan."*

---

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan Meskipun demikian, BUMDes Sambangan telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin kepada pemerintah desa dan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Hal ini menunjukkan adanya bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, meskipun kualitas informasi masih perlu ditingkatkan.

### ***Upaya Perbaikan***

Sebagai respons atas berbagai kendala, BUMDes Sambangan berencana menggunakan sistem aplikasi khusus pada unit usaha air untuk mempermudah proses pencatatan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang.

*"BUMDes berencana untuk menggunakan sistem aplikasi khusus di bidang usaha air. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan, meningkatkan efisiensi, serta membuat pengelolaan piutang menjadi lebih sistematis dan akurat."*

Bapak Made Arsana (Bendahara), 10 Maret 2026, Kantor BUMDes Sambangan Sistem digital diharapkan dapat mendukung input data berkala secara *real-time*, memantau tagihan pelanggan, serta mengawasi keterlambatan pembayaran. Langkah ini mencerminkan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif good governance. Apabila diterapkan secara optimal, sistem ini dapat membantu penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai SAK ETAP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes secara keseluruhan.

### ***Implikasi***

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh standar, tetapi juga oleh kesiapan internal organisasi. Hasil ini memberikan bukti empiris pendukung teori institusional keberadaan SAK ETAP belum cukup tanpa kesiapan SDM dan sistem pencatatan. Dari perspektif good governance, tidak tersajinya piutang menyebabkan transparansi dan akuntabilitas rendah, sehingga memperkuat hubungan antara penerapan basis akrual dengan upaya mewujudkan tata kelola yang baik.

Diperlukan penyesuaian sistem pencatatan dari basis kas menuju basis akrual secara bertahap mulai dari pengakuan, pengukuran, hingga penyajian piutang dalam laporan keuangan. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan akuntansi menjadi faktor kunci. Pengembangan sistem pencatatan terintegrasi (seperti aplikasi unit usaha air) dan penyusunan kebijakan pengelolaan piutang sebagai bagian dari pengendalian internal juga perlu dilakukan, agar laporan keuangan lebih akurat, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penyusunan tugas akhir, skripsi, maupun penelitian lanjutan di bidang akuntansi sektor publik pada entitas skala kecil. Civitas akademika dapat berperan strategis melalui kegiatan pengabdian Masyarakat, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sistem pencatatan keuangan BUMDes untuk membantu mengatasi kesenjangan antara teori dan

praktik di lapangan demi pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan sesuai standar akuntansi berlaku.

## SIMPULAN

Implementasi akuntansi piutang berbasis akrual pada BUMDes Giri Amertha Desa Sambangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP karena pencatatan keuangan masih cenderung berbasis kas dan belum terintegrasi dengan baik. Piutang baru dicatat saat kas diterima sehingga belum disajikan sebagai aset secara optimal dalam laporan keuangan. Selain itu, pengukuran piutang masih sederhana, belum terdapat pengelompokan umur piutang maupun pencadangan kerugian piutang. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, minimnya pemahaman akuntansi berbasis akrual, serta sistem pencatatan yang masih manual sehingga informasi keuangan belum real-time dan kurang relevan. Meski demikian, BUMDes telah berupaya menerapkan transparansi melalui pelaporan rutin dan rencana penggunaan aplikasi pencatatan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Penulis menyarankan agar pengelola BUMDes Giri Amertha Sambangan mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai SAK ETAP, khususnya dalam pengakuan dan pencatatan piutang, serta meningkatkan sistem pengendalian piutang melalui pencatatan umur piutang, prosedur penagihan, dan pembentukan cadangan piutang tak tertagih. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan akuntansi perlu dilakukan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian pada aspek lain dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di BUMDes, seperti pengelolaan aset tetap, persediaan, maupun sistem informasi akuntansi, serta memperluas objek penelitian pada beberapa BUMDes dengan pendekatan yang berbeda agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan praktik akuntansi pada lembaga ekonomi desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, K. E., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 91-98.
- Astawa, N. P., & Dewi, N. W. Y. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Aling-Aling Waterfall Sebagai Pendapatan Tambahan Desa Sambangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.28411>
- Bonollo, E. (2022). Negative effects of the adoption of accrual accounting in the public sector: a systematic literature review and future prospects. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 35(6), 1-27. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0097>
- Budiyasa, I. K., & Trisna Dewi, N. A. W. (2023). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kecukupan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja

- Bumdes (Studi Empiris Pada Bumdes di Kecamatan Sawan). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(03), 500–512. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i03.50066>
- CIPFA. (2020). International Framework: Good Governance in The Public Sector. In *Legal Challenges to the Far-Right*. <https://doi.org/10.4324/9780367808617-3>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dharmawan, N. A. S., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). *Accountability Based on Tri Hita Karana (THK) in Sangsit Village*. 158(Teams), 291–295. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.041>
- Firdaus, I., & Rencana Sari Dewi, G. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Dawan. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 93–102. <https://doi.org/10.23887/vjra.v13i3.81947>
- Gunawan, I. B. A., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 824–837. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64893>
- Indrawan, I. P. A., & Dewi, P. E. D. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDES Se-Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 501–512. <https://ejournal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/view/579>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Musmini, L., Sulindawati, N. L., Yudiantara, I., & Devi, S. (2024). *Peningkatan Pengelolaan Pencatatan Keuangan BUMdes Desa Sambangan Melalui Pelatihan dan Pendampingan Akuntansi*. 9(November).
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Herliyani, E. (2024). *Desa Sambangan-Buleleng Sebagai Desa Binaan Untuk Mendukung Pertumbuhan Cross-Cutting Entrepreneurs*. 9(November), 1–7.
- Puspita, I., & Adiputra. (2023). *Pengaruh Tata Kelola Lpd, Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se-Kabupaten Buleleng*. 2, 2–3.
- Resika Adnyani, N. M. D., & I Putu Gede Diatmika. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akruar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(3), 143–151. <https://doi.org/10.23887/vjra.v13i3.83643>
- Sinarwati, N. (2023). Villages Without Poverty Through the Construction of the Bumdes Collaboration Model To Build Village Entrepreneurs. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 29(1), 138–142.

- Sinarwati, N., & Suarmanayasa, N. (2023). Did BUMDes's Resources Contribute to Village Economic Development? *International Journal of Social Science and Business*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i1.60266>
- Veronika, K. A., & Atmadja, A. T. (2024). Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan , Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi , dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada BUMDesa di Kecamatan Banjar ). 14(2), 212–223.
- Wasuka, I., & Sinarwati, N. K. (2025). Analisis Analisis Kualitas Laporan Keuangan BUMDes (Studi Pada BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod): BUMDes, Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan ...*, 15(1), 47–57.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/92008%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/92008/32389>